Wakil Ketua BPK Resmikan Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara





Selasa, 1 Maret 2016 Wakil Ketua BPK RI, **Bapak Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., C.P.A., C.A.** meresmikan Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, di Jalan sawah kasar, helvetia, Medan.









BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA TERIMA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH











Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

DISKUSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH MENGENIAL KIENDALAKENDALA YANG DIHADAPI PEMERIKAH DAERAH DALAM MENINDAKLANJUTI HASIL PEMERIKSAYAN BPK



amis, 10 Maret 2016. Bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan kegiatan Diskusi dengan Pemerintah Daerah Mengenai Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam Menindaklanjuti hasil Pemeriksaan BPK. Acara yang diikuti oleh seluruh Inspektur dan Kepala DP-PKAD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara tersebut dibuka oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Dra. Vincentia Moli Ambar Wahyuni, M.M., Ak. dalam sambutannya Kepala Perwakilan menyampaikan kegiatan diskusi dengan Pemerintah Daerah tersebut, dimaksudkan untuk mengetahui permasalahanpermasalahan yang terjadi dalam tindak lanjut yang telah dilakukan. Tindak lanjut merupakan salah satu indikator kesungguhan dan komitmen entitas untuk memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah agar lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya. berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Ketentuan tersebut memberi waktu 60 hari sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan BPK, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan jawaban/memberi penjelasan atas tindak lanjut yang dilakukan.

REDAKSI

skandar Setiawan, Venny, Lys Anita E. Butar-Butar, Desi Theresia S, Awiek Pramayudha, Ahmad Nur, Petrus Sihaloho.

ALAMAT REDAKSI:

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jl. Imam Bonjol No.22 Medan Telp. 061-4519039

klik......

www.medan.bpk.go.id

untuk mengunduh

verzi digital

Buletin Sekilaz Warta BPK

BERITA FOTO





Kunjungan Kerja Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara







Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada BPK maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Rabu, 30 Maret 2016. LKPD tersebut diserahkan oleh Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, dan diterima oleh Kepala Sub Auditorat Sumut III, Aris Laksono.

Turut hadir dalam acara ini, Inspektur dan Kepala Dipenloka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Dari pihak BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara turut hadir Kepala Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan, Iskandar Setiawan, dan Anggota Tim Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. LKPD yang diserahkan oleh Pemkab Tapanuli Utara terdiri dari Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan SAL dan Laporan Perubahan Ekuitas. LKPD Kabupaten Tapanuli Utara ini merupakan LKPD Tahun Anggaran 2015 yang pertama diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun lalu, LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 23 Maret 2015.

Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Utara Tindak Lanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Bmenyelenggarakan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) pada tanggal 22 Maret 2016. Acara tersebut diikuti oleh inspektorat Pemerintah Daerah se-wilayah Provinsi Sumatera Utara. Bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, acara tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Perwakilan, V. M. Ambar Wahyuni, dalam sambutannya Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan wujud nyata BPK dalam rangka melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut hal tersebut didasarkan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan BPK memantau

PK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Pemantauan Tindak Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) mengal 22 Maret 2016. Acara tersebut diikuinspektorat Pemerintah Daerah se-wilayah i Sumatera Utara. Bertempat di Auditorium perwakilan Provinsi Sumatera Utara, acara tersebut dirikan secara langsung oleh Kepala Perwakilan, Ambar Wahyuni, dalam sambutannya Kepala ilan menyampaikan bahwa kegiatan peman-







